

TERJEBAK ELEKTORALISME: CATATAN TENTANG DEMOKRASI INDONESIA DUA DEKADE TERAKHIR

Muhammad Natsir¹, Muhammad Ridha²
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: rifqahainiyah@gmail.com¹, lari_larija@yahoo.co.id²

Abstract

This article collates on the argument that democracy built in Indonesia in the last two decades after the fall of the New Order regime has been increasingly electoral. It even forms of regime in electoral that extends its definition and practice to the lowest level of society such as at the district/city level or even at the village level. Unfortunately, this electoral progress has not been followed by social empowerment, justice and even distribution of economic resources. It even leads to an increasingly differentiated society that is materially more tangible or ownership of productive resources.

Keywords:

Democracy; Elektoralisme; Contestation

Pendahuluan

Tulisan ini adalah refleksi atas persoalan demokrasi Indonesia sejak jatuhnya Soeharto yang tidak makin maju secara substansial. Yang ada hanyalah pagelaran kontestasi elektoral yang elitis semata. Lebih dari itu, di tingkat bawah, hidup makin tak punya daya letup. Jokowi, seorang pemimpin populis yang terpilih pada 2014 secara demokratis – dalam arti syarat-syarat elektoral- tetapi kita dapat menyaksikan ketimpangan, kemiskinan¹, kurangnya daya tawar gerakan sosial, partisipasi luas masyarakat dan isu politik substansial tak berkembang telah menjadikan hidup sama memburuknya dari kemarin! Dalam waktu dekat dia bertarung lagi melawan calon yang dulu menjadi lawannya di pemilu 2014. Dengan menggambarkan bagaimana proses elektoral yang mahal di semua tingkatan di Indonesia, tulisan ini bermaksud memperlihatkan arah demokrasi kita belumlah mengarah pada tujuan-tujuan emansipasi rakyat.

¹ Meski data BPS tahun 2018 menunjukkan data kemiskinan turun sampai 1 digit menjadi 9 % lebih. Angka yang juga sebenarnya masih amat tinggi.

Pemilu DPR, DPRD tingkat I dan DPRD Kabupaten Kota, serta DPD juga Pilkada ti setiap tingkatan adalah proses yang digelar dengan ongkos yang mahal. Bukan hanya biaya ekonomis yang raksasa, tetapi juga menelan ongkos sosial yang juga tidak kecil. Konflik dan sengketa Pilkada contoh kongkrit harga yang seringkali harus kita bayar demi proses kontestasi kekuasaan beberapa gelintir elit.

Sekedar contoh biaya ekonomis Pilkada Jatim misalnya lebih besar dari biaya kampanye Capres Amerika. Coba diperhatikan, KPUD Jatim menganggarkan biaya perhelatan tersebut tidak kurang dari Rp 500 miliar. Sementara itu, tim pemenangan “Karsa” (pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf), melalui sebuah media mengakui biaya politik yang sudah dibelanjakan bisa lebih dari Rp 1,3 triliun. Bisa-bisa total dana yang dibelanjakan lima pasangan calon plus KPUD Jatim mencapai Rp 5 triliun.

Sebuah jumlah yang fantastis bila dibandingkan dengan dana kampanye Barack Obama, yang hingga Juni 2008 sekitar Rp 2,5 triliun, Hillary Clinton sekitar Rp 1,8 triliun, dan John Mc Cain sekitar Rp 932 miliar. Itu belum menghitung ongkos sosial yang harus dibayar seperti perseteruan antar pendukung, intrik dan kesaling curigaan di antara masyarakat. Mengingat biaya raksasa itu Hazim Muzadi (ketua PBNU) mengusulkan untuk menghapuskan Pilkada Langsung. Ini menghambur-hamburkan anggaran.²

Bisa dibayangkan negara yang penduduknya masih miskin dengan penghasilan di bawah 2 dollar AS perhari masih mencapai 1/3 lebih dari total penduduk merayakan pesta elitis bernama pilkada artifisial begitu banyak. Bersamaan dengan Suharto tumbang konflik Poso, Ambon dan Maluku menyeruak setelah dirawat oleh represi resim Suharto. Walaupun kemudian itu bisa diselesaikan sampai sekitar tahun 2005 setelah Poso dan Ambon berturut-turut sepakat berdamai dengan penandatanganan perjanjian Malino I dan II. Kemudian disusul Aceh dengan kesepakatan Helsinki pada 2005. Demokrasi mengalami cobaan berat di sini. Jika demokrasi tidak melahirkan kepemimpinan yang akomodatif, ini bisa melahirkan kembali konflik sosial melalui kontestasi yang selalu menyisakan persoalan. Kata Elizabet Santi Kumala Dewi ini akan menyisakan ‘bom waktu sosial’ yang bisa setiap saat meledak(<http://io.ppi-jepang.org/cetak.php?id=60>).

² <http://www.lakpesdam.or.id>.

Kontestasi yang penuh intrik dan kecurangan dalam Pilkada juga akan melahirkan konflik-konflik sosial yang bisa menyumbang disintegrasi sosial. Pada 2007 di Sulawesi Selatan terjadi gejolak akibat keputusan Pilkada yang tidak tegas. Kemudian disusul Pilkada Maluku yang juga melahirkan konflik antara pendukung pasangan Calon yang berkontestasi. Sebelum ini juga di Tuban ada keriuhan akibat keputusan Pilkada juga dan beberapa tempat di seluruh Indonesia yang totalnya telah menggelar Pilkada sebanyak 224 kali di Provinsi dan Kabupaten kota pada Juni hingga Desember 2005. Biayanya mencapai Rp. 627.871.233.141.

Tahun 2015 ini akan diisi oleh Pilkada yang amat ramai. Kabarnya, 224 daerah menggelar Pilkada serentak³. Tahun sebelumnya hingga awal tahun 2015 pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan pemilihan presiden. Ongkosnya tentu amat besar.

Pemilihan kepala daerah saja misalnya dengan aritmatika sederhana menelan biaya pemerintah yang sangat besar, tidak sebanding dengan manfaatnya bagi rakyat. Selain dana pemerintah, dana kandidat kepala daerah maupun dana partai akan bertaburan di sana-sini saat syahwat kekuasaan dan politik memuncak. Dana untuk pilkada selalu di atas Rp1 miliar bahkan ada beberapa provinsi yang biaya pilkada bisa mencapai Rp1 triliun. Secara sederhana, dengan rata-rata biaya per Pilwalkot atau Pemilihan Bupati (Pilbup) Rp. 25 Miliar, dan per Pemilihan Gubernur (Pilgub) 500 Miliar, maka dalam 5 tahun uang negara untuk pilkada di Indonesia minimal Rp. 30 Triliun. Aritmatika ini tentu akan terus berlaku sebab pilkada masih terus digelar meski dengan format yang lebih sederhana dalam suatu pilkada serentak seperti yang telah dilakukan baru-baru ini di tahun 2017 sebanyak 101 daerah dan terakhir di tahun 2018 pada 171 daerah.

Berdasarkan data hingga Desember 2012, Indonesia terdiri dari 410 kabupaten/kabupaten administrasi dan 98 kota/kota administrasi yang tersebar di 34 provinsi. Praktis, sebanyak 409 kabupaten, 93 kota, dan 34 propinsi harus melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sekali dalam 5 tahun. Secara sederhana, dalam

³www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fnasional.kompas.com%2Fread%2F2014%2F11%2F04%2F19305961%2F204.Daerah.Gelar.Pilkada.Serentak.pada.2015&ei=r2awVKKMPNC8uASU5IGYCA&usg=AFQjCNHS9YaoUv8C8UyETef9BCcy6f6fUA&sig2=rofeSqE9JZR0UnWLD6nCeg&bvm=bv.83339334,d.c2E8
Januari 2015

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terjadi 536 Pilkada, atau minimal rata-rata 44 Pilkada per tahun, atau sekitar 1 Pilkada per Minggu.⁴

Pilkada serentak pada 2018 ini melibatkan 171 daerah dengan 17 provinsi dan 115 kabupaten dan 39 kota. Sebanyak 16 daerah (kota/kabupaten) menggelar pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong. Dari seluruh pilkada yang digelar, tidak menunjukkan suatu kemajuan substansial dari partisipasi rakyat kecuali kasus pilkada makassar yang memenangkan kotak kosong. Cerita kotak kosong ini lumayan menarik dan menjadi catatan kecil dari ratusan pilkada yang digelar serentak tahun 2018 ini. Pada awalnya walikota makassar yang terkenal berani dan terbuka itu mencalonkan diri justru tidak lewat partai sebab ada gerakan sistematis yang melucuti partai yang akan memberikannya rekomendasi. Itu terlihat dalam perjalanan pencalonannya mulai terlihat kalau partai-partai yang sebelumnya mendukung malah berpindah ke Calon Lawannya yang pada akhirnya diusung oleh 10 partai politik sementara pak Danny Pomanto sendiri memilih jalur independen meski ada partai demokrat yang menjadi partai pendukung (bukan pengusung). Ketika proses pencalonan telah beres dan resmi menjadi calon, dengan sejumlah halangan, lawannya, Pasangan Munafri Arifuddin dan Rahmatika Dewi (appi-Cicu) melayangkan gugatan pembatalan pencalonan pak Danny karena ditengarai memanfaatkan jabatan untuk kemenangan dirinya sendiri. Di tingkat pertama gugatan dimenangkan oleh pihak danny Pomanto atau pengadilan mengukuhkan pencalonan pak Danny tetapi hasil di tingkat selanjutnya dan kasasi memenangkan gugatan pasangan Appi-Cicu sehingga pencalonan pak Danny pun batal. Tetapi proses ini penuh dengan intrik yang dicurigai oleh masyarakat luas sebagai sesuatu yang didesain oleh kekuasaan oligarki di Sulawesi Selatan yang jangkauannya bisa masuk ke dalam proses peradilan dan institusi negara berkait. Menariknya, melihat kenyataan perlakuan yang tidak fair ini kemudian ditanggapi warga dengan memilih kotak kosong.

Kasus Pilkada Makassar kemudian menjadi contoh menarik dan berkembang dalam diskusi-diskusi politik gerakan sosial dimana rakyat dan kedaulatannya tidaklah mudah dimanipulasi dan ditundukkan ketika kesadarannya akan kewargaan dan keberpihakannya kepada kepemimpinan yang nyata dilihatnya bekerja terusik oleh

⁴ <http://politik.kompasiana.com/2013/05/28/pilkada-habiskan-uang-negara-30-trilyun-hanya-memilih-calon-koruptor-563870.html> diunduh 8 Januari 2015

kekuatan yang tak cukup baik. Meski kelemahan dari kasus kotak kosong di makassar ini lebih bersifat insidensial dan emosional karena dipengaruhi oleh drama ketidaklolosan calon Pilkada lain yang terjadi secara dramatis dan mengusik rasa keadilan orang biasa. Tapi bagaimanapun, gejala kontestasi ini terus menunjukkan betapa percayana kita kepada demokrasi elektoral yang mahal ini tanpa lebih jauh masuk ke substansi demokrasi seperti partisipasi rakyat secara lebih luas, kesadaran kelas dalam bentuk suatu organisasi berbasis kelas, perjuangan terorganisir melalui kanal-kanal demokrasi atau mungkin pembentukan partai politik yang sungguh-sungguh berasal dari problem kelas tertentu dan kemudian memperjuangkannya.

Gejala apa yang bisa ditangkap dari kepercayaan pemerintah dan rakyat atas kontestasi yang tiada henti ini? lalu apa yang dihasilkan oleh kontestasi tak henti-henti ini? Apa yang dihasilkan oleh demokrasi elektoral yang mahal ini? Catatan berikut akan mengilustrasikan apa yang dihasilkan oleh demokrasi elektoral semacam ini.

Terperangkap Elektoralisme

Makna paling minimalis dari demokrasi adalah demokrasi elektoral. Oleh Schumpeter demokrasi elektoral dimaknai sebagai sebuah sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif memperebutkan suara rakyat (Larry Diamond; 9). Preworski dan rekan-rekannya mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah rezim yang menyelenggarakan pemilihan-pemilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan.⁵ Oleh Diamond dirumuskan sebagai sebuah sistem konstitusional yang menyelenggarakan pemilu multi partai yang kompetitif dan teratur dengan hak pilih univesal untuk memilih anggota legislatif dan kepala eksekutif.⁶

Dengan pengertian yang kurang lebih sama yakni menekankan demokrasi yang mengutamakan pemilu berkala dan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Hal ini menarik untuk melihat kasus Indonesia yang seperti dikatakan di pengantar bahwa telah melakukan Pemilu pada 1999 dan Pemilu langsung hingga yang terakhir tahun 2014 serta pada 2004 telah mengesahkan UU No.32 tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Hiruk pikuk ini juga

⁵Larry Diamond (2003) *Developing Democracy Toward Consolidation*(Yogyakarta: IRE) H. 9

⁶Larry Diamond (2003) *Developing Democracy Toward Consolidation*(Yogyakarta: IRE) H.11

ditambah dengan berakhirnya tahun pemilu tahun 2009 dan 2014 dan disambutnya sejumlah gelombang Pilkada serentak setelahnya hingga terakhir di tahun 2018.

Gejala pesta demokrasi dengan pemilihan dan kontestasi massal dari anggota dewan, mulai dari daerah sampai pusat, hingga pada Pemilu presiden dan wakil presiden ini menarik untuk diperhatikan. Fenomena terakhir ini menunjukkan adanya perhatian yang demikian besar, berupa pengerahan energi moril dan materil, dari masyarakat (terutama elit yang berkepentingan langsung) menyambut pemilihan ini.

Walaupun begitu ada juga sebagian kalangan yang mengkritik ini sebagai pemilu kaum elit borjuis. Mungkin beralasan pada disahkannya aturan tentang batas minimal partai yang bisa mencalonkan presiden sampai ada 25 persen suara secara nasional. Itu berarti tertutup ruang bagi kandidat alternatif yang tidak memiliki dukungan partai yang memadai. Karena ini pulalah mungkin angka golput diperkirakan akan naik lebih dari Pemilu sebelumnya. Akan demikian juga nampaknya pemilu 2019 yang hanya akan diikuti oleh dua pasang calon yakni Joko Widodo berpasangan dengan KH. Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto dan Sandiogo Uno. Banyak kalangan kecewa pada terpilihnya dua pasang calon ini. Lebih banyak lagi yang kecewa karena calon presiden memilih calon wakil yang justru dianggap merepresentasikan suatu pilihan-pilihan akomodatif berdasarkan ketakutan: yang satu pasang memilih seorang kiyai karena keterpaksaan dan desakan dari beberapa partai yang 'mengancam' akan membentuk poros baru yang berpotensi melemahkannya karena itu meski calon yang akhirnya dipilih adalah seorang Kiyai sepuh yang memiliki pandangan yang bisa mengancam pluralitas dan kebersamaan. Kiyai ini diketahui menjadi inisiator gerakan 212 dan membuat fatwa yang memojokkan Minoritas. Sementara itu, di seberang lainnya, Prabowo Subianto akhirnya memilih seorang wakil gubernur yang belum genap setahun menjabat, menurut sejumlah kalangan ini untuk menjamin logistik pertarungan yang harus ditunjang. Sandiogo Uno memang seorang pengusaha kaya, muda dan potensial meski dianggap tidaklah memenuhi harapan banyak kalangan di sekitar Prabowo Subianto sendiri. Seperti misalnya partai demokrat yang masih menyuarakan kasus kardus 500 M yang dituduhkannya atas jatuhnya pilihan kepada Sandioga dari partai PAN dan PKS kepadanya. Sebuah pilihan yang amat akomodatif. Apalagi, pada akhirnya kita harus menerima kenyataan hanya dua pasang calon presiden lagi, sehingga aspirasi-aspirasi mereka yang tidak diakomodasi oleh kedua pasang calon ini akhirnya

harus memilih diantara keduanya atau bisa jadi akan Golput, atau tidak memilih diantara keduanya.

Gejala ini dikatakan oleh Vedi R Hadiz bahwa ‘tidak diragukan lagi bahwa dewasa ini terdapat ciri-ciri baru yang berkembang dalam politik Indonesia pasca Suharto. Elektoralisme telah menjadi jauh lebih penting, seperti halnya partai politik, MPR dan DPR/DPRD sebagai sebuah arena persaingan politik di antara elit-elit yang saling berkompetisi.⁷ ‘Ciri-ciri baru’ itu memang sedang menggejala luar biasa di Indonesia dewasa ini. Bahkan jauh setelah Pemilu presiden pertama yang demokratis pada 1999. Mungkin ini akibat ‘pukulan balik’ masyarakat yang selama ini berada dalam kekangan dan upaya depolitisasi dan demobilisasi massa dari Orde baru. Sebagaimana dicatat Vedi ‘elemen penting dari resep orde baru untuk memelihara ketertiban politik, dengan demikian adalah depolitisasi dan demobilisasi massa melalui pendisorganisasian civil society’.⁸

Apa yang telah dipaparkan ini telah memperlihatkan gejala seperti disebutkan di atas sebagai gejala elektoralisme. Keterpakuan pada agenda-agenda sempit demokrasi. Ini bisa menyebabkan mandegnya sistem kerja lain. Inilah yang dikritik oleh Terry Karl sebagai ‘kekeliruan elektoralisme’⁹

Dan kekeliruan itu tengah berjingkrak di dalam keseharian kita saat-saat ini. Musim pemilu telah sampai lagi. Apalagi pemilu presiden dilakukan bersamaan dengan pemilu parlemen. Maka ruang publik kita akan amat bising dengan kontestasi-kontestasi ini. Tak memandang bahwa sebuah negara memerlukan perhatian dari aparatnya, bukan hanya bila datang saat pemilihan, tak memandang bahwa mayoritas masyarakat akibat kebijakan yang salah telah menderita, juga tidak melihat kalau kemiskinan yang terus berkuat di negara kita tidak cuma membutuhkan Pilkada atau Pilpres. Tetapi, yang jauh lebih penting, demokrasi politik dalam bentuk elektoralisme ini harus dilengkapi dengan demokrasi di tempat lainnya yang lebih substansial. Demokrasi ekonomi, demokrasi hukum, dan demokrasi kultur menghadapi dan mengelola perbedaan. Itu semua belum selesai dengan hanya berkuat pada kubangan elektoralisme.

⁷ Vedi R Hadiz (2005) *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Suharto* (Jakarta; LP3ES). H.208

⁸ Vedi R Hadiz (2005) *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Suharto* (Jakarta; LP3ES). H. 213

⁹ Larry Diamond (2003) *Developing Democracy Toward Consolidation*(Yogyakarta: IRE) H. 10

Hal ini menjadi penting diajukan untuk tidak terjebak pada pemilu raya tak berkesudahan yang tidak ada relevansinya dengan pembangunan hidup dan kemandirian rakyat. Catatan berikut akan memperlihatkan bila elektoralisme hanya menghasilkan sistem sosial-ekonomi yang hancur oleh fragmentasi atau differensiasi kepemilikan sumber-sumber penghidupan yang makin kentara dan telanjang.

Horor Statistik

Baru-baru ini majalah Forbes merilis data orang terkaya di Indonesia. Kekayaannya amat besar. Sebagai misal seorang kawan yang iseng menghitung 10 orang terkaya tersebut di Indonesia jika dibandingkan dengan penghasilan buruh dengan UMP DKI sebesar 2,7 Juta perbulan jika dikumpulkan selama setahun sejumlah sekitar 20 juta lebih buruh baru bisa setara dengan 10 orang terkaya di Indonesia. 10 = 20.444.444!

Tabel 1
Nama orang terkaya Indonesia dan Jumlah hartanya

Nama	Harta (triliun)
Budi & Michael	198.000.000.000.000
Susilo Wonowijoyo	96.000.000.000.000
Anthoni Salim	70.800.000.000.000
Eka Cipta Wijaya	69.600.000.000.000
Sri Prakash	52.800.000.000.000
Chairul Tanjung	51.600.000.000.000
Boenyamin Setiawan	42.000.000.000.000
Mochtar Riady	28.800.000.000.000
Peter Sondakh	27.600.000.000.000
Sukanto Tanoto	25.200.000.000.000
Total	662.400.000.000.000

Sumber: majalah Forbes edisi Tahun 2014

Jika dibandingkan dengan penghasilan buruh dengan UMR tertinggi seperti di DKI Jakarta, maka kekayaan sepuluh orang terkaya ini baru bisa setara dengan hasil kerja dari 20.444.444 buruh selama setahun. Berikut ilustrasinya:

Tabel 2
Ilustrasi perbandingan harta kekayaan 10 Orang terkaya Indonesia dengan kekayaan Buruh Biasa

UMP DKI (bulan)	Satu tahun
2,700,000	32,400,000

(A) Total Kekayaan 10 org	(B) Gaji Buruh 1 tahun	A/B
662,400,000,000,000	32,400,000	20,444,444

Jadi, untuk menandingi 10 orang terkaya di Indonesia maka 20,444,444 (dua puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat) buruh harus menabungkan semua gajinya selama 1 tahun. Gak usah makan.

Kenyataan seperti yang diceritakan di atas dicatat oleh Laclau dan Mouffe¹⁰ dalam bukunya *Hegemoni dan Strategi Sosialis*:

“Masyarakat kapitalis bergerak ke arah semakin meningkatnya konsentrasi hak milik dan kekayaan di tangan beberapa perusahaan besar; dan ke arah proletarisasi dari sebagian besar strata sosial dan kategori pekerjaan yang berbeda-beda yang berlangsung secara cepat, dan semua ini berkombinasi dengan semakin meningkatnya pemiskinan kelas buruh”.

Ketimpangan kepemilikan sumber-sumber penghidupan seperti yang dikemukakan di atas amatlah mudah dipungut disana-sini di banyak daerah di Indonesia. Sebagai misal di daerah peri-urban di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan berlangsung proses konsentrasi lahan ke sejumlah keluarga pemilik perusahaan properti dan sebaliknya keterlepasan penguasaan atas tanah terjadi di sebagian warga desa lainnya.

Data berikut akan menunjukkan gejala konsentrasi tersebut. Luasan lahan sepuluh perusahaan ini mulai dari 4,3 Ha hingga yang terluas 30 Ha¹¹. Berikut ini data sepuluh perusahaan yang dimiliki oleh sekitar 10 keluarga dengan luas konsesi untuk usaha perumahannya yang terluas di tiga kelurahan ini:

¹⁰ Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe *Hegemoni dan Strategi Sosialis Postmaxisme + Gerakan Sosial Baru* (Yogyakarta: Resistbook, 2008) hlm. 14

¹¹ Muhammad Ridha Mamminasata dan Perubahan Sosial di Pedesaan *Laporan Penelitian LP2M UIN Alauddin Makassar 2014*

Tabel 3
Perumahan Dengan Jumlah Luas Lahan Tertinggi di kelurahan Paccinongan, Samata dan Romang Polong

Nama Perumahan	Jumlah (unit)	Pengembang	Pemilik	Luas	Tahun
BTN Pao-Pao Permai	±1000	CV Haji Banca	Haji Banca	30 Ha	1994
Patri Abdullah	±300	CV Patri		9 Ha	2006
Graha Surandar I, II	±300	PT. Surandar	H. Burhanuddin Abu	9 Ha	2007
Mutiara Indah Village	±300	BSA Land		11 Ha	2011
Bumi Aroepala	±400	PT. TBS	Arif Mone	20 Ha	2010
Royal Spring	±900	BSA Land		21 Ha	2012
Puri Diva Istanbul	±1000	PT. Diva Yamasey	Hj. Andi Fatmawati	22 Ha	2012
Padi Residence	±190	Galesong	Risal Tandiawan	4,3 Ha	2012
Citra Garden	±1300	Ciputra Land	Ciputra	27 Ha	2013
Modern Land	611	IMB Property	Idris Mangga Barani	20 Ha	2013
Jumlah				152,3 Ha	

Sumber: Wawancara dan perhitungan olahan data lapangan (Dari berbagai Sumber)

Sementara di sisi yang lain ada kenyataan ketunakismaan yang makin tinggi di desa tersebut. Di kelurahan Romang Polong, misalnya, dari 129 petani yang lahannya di Romang Polong, ada 59 orang petani penggarap tuna kisma, atau 45% dari total jumlah petani yang bertani di Romang Polong. Dari keseluruhan jumlah petani anggota Gapoktan Romang Polong, 58 orang diantaranya, dalam tahun 2013 saja, kehilangan lahan pertanian antara 10-60% atau berkurang 23,24 Ha lahan¹². Bahkan menurut catatan pemerintah kelurahan Romang Polong, 45% lahan digarap oleh petani penggarap atau tunakisma. Untuk lebih jelas berikut kami sajikan tabel petani pemilik

¹² Data olahan dari rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2013 untuk kelurahan romang polong dan Wawancara Dg Naba

penggarap dan petani penggarap yang menggarap di wilayah kelurahan Romang Polong:

Tabel 4
Persentase Petani Pemilik penggarap Lahan Dan Petani Penggarap Tidak Memiliki Lahan

Petani yang Menggarap Lahan di Kelurahan Romang Polong	
Pemilik Penggarap	Petani Penggarap (tunakisma)
70 Ha	59 Ha
55%	45%

Kenyataan seperti ini juga penulis temukan di daerah Blitar. Sebuah daerah yang dikategorikan sebagai wilayah Jawa bagian selatan yang relatif miskin. Data berikut ini menunjukkan hal yang sama seperti data di atas, yakni konsentrasi sumberdaya ke sejumlah kecil keluarga sementara di sisi yang lainnya sejumlah besar keluarga memiliki penguasaan yang relatif kecil kepada sumber-sumber penghidupan. Berikut sedikit informasi yang ditemukan di Blitar: Perusahaan perkebunan (PT Harta Mulia dan PT Sri Dewi) menguasai 463, 48 ha (77%) dan yang dikuasai oleh rakyat hanya 144 ha (23%) lahan dari keseluruhan lahan perkebunan 607, 68 ha lahan. Berikut ilustrasi tabelnya:

Tabel 5
Penguasaan Lahan Perkebunan antara Rakyat dan perusahaan perkebunan

Perusahaan (3 Keluarga)	Rakyat (± 7.000 jiwa)
463,48 Ha	144 Ha

Ini kenyataan tragik yang sungguh mengerikan. Di atas klaim negara demokrasi terbesar, berdiri kenyataan ketimpangan yang tak terdamaikan! Di satu sisi ada yang menguasai sejumlah besar sumber penghidupan, tetapi disisi yang lain ada banyak keluarga yang mengais-ngais sejumlah kecil saja sumberdaya yang masih tersisa. Demokrasi macam apa yang sedang kita gumuli ini?

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, kita bisa menarik sebuah simpulan dini bahwa elektoralisme atau demokrasi yang kita gelar sekarang ini belumlah cukup untuk

memenuhi agenda berbangsa yang memiliki begitu banyak tugas. Elektoralisme, mungkin sebuah jalan menuju demokrasi yang lebih dalam dan bermakna. Tetapi berkubang dalam perangkat elektoralisme hanya akan membuat semacam kemandekan demokrasi. Olehnya itu demokrasi kita perlu dimaknai ulang bukan hanya sekedar menjadi alat untuk kontestasi kekuasaan tetapi juga harus menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat. Sebagaimana telah disebutkan bahwa demokratisasi sebuah negara erat berkaitan dengan tingkat perekonomiannya. Bila ekonomi rakyat masih saja tersudut dan tak mendapatkan tempat yang layak maka harus ada redefinisi. Selama ini kita terjebak memaknai demokrasi hanya sekedar elektoralisme. Memang bahwa semakin lengkap suatu negara memenuhi standar-standar demokrasi elektoral (pemilu bebas, adil dan multi partai dengan sistem pemungutan suara) semakin tinggi pula tingkat pengakuan hak asasi manusianya

Karena itu, selain mengagendakan penguatan dan pemenuhan syarat-syarat demokrasi elektoral, juga dibutuhkan komitmen untuk memperbaiki kualitas demokrasi dengan menghubungkannya dengan program-program yang lebih substansial dan terukur bagi kemaslahatan bersama. Hal ini akan memperlihatkan tingkat kepercayaan atas demokrasi kian besar dan bisa memberi legitimasi bagi sistem demokrasi itu sendiri dan hasil atau konsekwensi yang dilahirkannya.

Tetapi ini ternyata belum menemukan konteksnya di Indonesia. Yang terlihat adalah keterjebakan pada elektoralisme itu. Padahal demokrasi sejatinya adalah proyek politik emansipasi – emansipasi individual dan emansipasi sosial¹³.Harusnya, demokrasi kita mendorong menguatnya ukuran-ukuran keadilan. Rasio Gini kita saat ini menurut data BPS tahun 2017 adalah 0,45. Suatu yang amat membahayakan. Ketimpangan yang merupakan cermin dari apa yang sudah saya sajikan di muka sebagai pengantar. Di Amerika latin, seperti kasus Kuba, sebuah negara kecil di Karibia, pendidikannya dibiayai gratis di semua jenjang. Menjadikan hampir semua penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan (2015). Hanya 1 % anak usia sekolah yang putus sekolah pada sekolah dasar. 98,2% pelajar sekolah dasar melanjutkan sekolahnya pada sekolah lanjutan. Pendidikannya diterapkan untuk semua dengan semangat memangkas seluruh diskriminasi warisan rezim lama sebelum revolusi. (berdikarionline.com). Sementara di

¹³ Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe *Hegemoni dan Strategi Sosialis Postmaxisme + Gerakan Sosial Baru* (Yogyakarta; Resistbook, 2008) Hal. xlv

Venesuela, negara yang dianggap oleh standar ekonomi makro memburuk punya reputasi demokratik yang tangguh. Di bawah presiden Sosialis Hugo Chavez, Venesuela mengkampanyekan suatu praktik sosialisme baru yang disebutnya sebagai ‘sosialisme abad 21’. Chavez sendiri terpilih secara demokratik melalui pemilu. Ia menjabat sebagai presiden sejak 1999 hingga meninggal di tahun 2013. Sepanjang masa kepemimpinannya, ia telah menetapkan konstitusi baru, mendirikan dewan partisipasi, menasionalisasi sejumlah industri penting, meningkatkan anggaran kesehatan dan pendidikan dan mengurangi tingkat kemiskinan secara besar-besaran. Program ini dilanjutkan oleh penerusnya, Nicolas Maduro, yang meski terpilih secara demokratik dalam pemilu, media-media kapitalis menggambarkan rezim ini sebagai rezim otoriter, justru karena program sosialisme yang diterapkannya secara ketat di bawah bayang-bayang embargo dan ancaman negara Amerika Serikat. Langkah kita malah menjauhinya. Pemilu melulu, calonnya itu-itu saja. Yang pertama presiden yang janjinya mangkak tak karuan. Yang lainnya calon berkalah masalah.

Kita sudah tentu kecewa. Harapan-harapan indah untuk ukuran-ukuran capaian demokrasi substansial di atas masih ‘jauh panggang dari api’. Semua ini masih menjadi mimpi indah rakyat yang sedang dirundung sengsara dan diolok-olok pilkada dan Pilpres. Kita mesti menegaskan perjuangan untuk itu bukan hanya dalam Pilkada. Bila kita tidak melakukan itu, meminjam istilah Sritua Arif kita akan menjadi *the criminal of the indonesian history*. Agenda-agenda kita mestinya sudah harus memperjuangkan lepasnya rakyat dari belenggu struktural akibat tidak adanya demokrasi ekonomi. Belenggu yang sengaja dirawat oleh jaringan kuasa oligarki kapitalistik yang masih berseliweran memegang tampuk-tampuk kekuasaan. Belenggu struktural yang dimaksud adalah:

1. Hubungan yang tidak adil (eksploitatif) antara aktor-aktor yang mewakili kelompok kuat dalam ekonomi dengan aktor-aktor yang mewakili kelompok lemah, dalam penjualan hasil-hasil produksi yang diproduksi oleh aktor-aktor kelompok lemah ini yang terdiri dari produsen kecil-produsen kecil
2. Kepincangan mencolok dalam penguasaan harta-harta produktif, terutama tanah di daerah pedesaan sebagai akibat dari proses eksploitasi yang telah berlangsung lama. Administrasi birokrat yang bukan hanya turut membantu proses hubungan yang tidak adil antara kelompok kuat dengan kelompok lemah dalam ekonomi, tetapi juga

turut menjadi penghalang dan penghambat proses emansipasi sosial (Sritua Arif, 2006; 233-234).

Demokrasi yang kita lakoni seharusnya menuju ke arah emansipasi kemanusiaan ini. Bukan pada keberpihakan politik sektarian yang hanya akan melahirkan intrik dalam kontes elektoralisme yang menjebak itu. Vedi mengingatkan bahwa ‘demokrasi, dalam kondisi tertentu, tidak kalah bergunanya bagi berbagai kepentingan predatoris, sebagaimana rezim otoritarian yang anti demokrasi..’(Vedi Hadiz;271). Bahkan ada kekuatan lain yang dikhawatirkan oleh Coen Husain Pontoh yang akan lebih berbahaya. Kekuatan korporasi multinasional yang berkembang menjadi finance oligarchy yang bersiap-siap melucuti demokrasi dan keadilan social(2005;xiii). Karenanya, di tengah bangkitnya kekuatan yang hendak membajak demokrasi, pesan reflektif emansipatoris ini mesti kembali direnungkan. Apalagi pemilu tinggal 8 bulan lagi. Memilih sambil menyusun suatu intervensi akan lahirnya imajinasi elektoral baru berupa partai rakyat kecil yang nyata-nyata memiliki keanggotaan luas dari kader rakyat kecil, berasumsi pada keadilan secara luas dan paling tidak mendorong dua hal: *pertama*, pelibatan aktif rakyat miskin dari seluruh komponen kelas bawah dalam kepengurusan dan dalam seluruh pembangunan partai, bukan semata-mata menggunakan jargon rakyat kecil tetapi keanggotaannya justru tak mengakomodasi rakyat kecil, tetapi oligarki. *Kedua*, bercita-cita membangun suatu antitesa dari rezim pemilu mahal, borjuis dan elektoralis! *Wallahu A'lam Bi sawab*

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Sritua (2006) *Negeri Terjajah Menyingkap Ilusi Kemerdekaan*(Yogyakarta; Resist Book)
- Diamond, Larry (2003) *Developing Democracy Toward Consolidation*(Yogyakarta: IRE)
- Hadiz, Vedi R (2005) *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Suharto* (Jakarta; LP3ES)
- Huntington, Samuel P (1997) *Gelombang Demokratisasi Ketiga*(Jakarta; Grafiti)
- Kleden, Ignas (2007) *Demokrasi Kontekstual Esai-esai pemikiran* (Makassar; Melania Fondation dan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi)

- Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe *Hegemoni dan Strategi Sosialis* (Yogyakarta; Resistbook, 2008)
- Markoff, John (2002) *Gelombang Demokrasi Dunia* (Yogyakarta; Center for Critical Social Studies dan Pustaka pelajar)
- Ridha, Muhammad *MAMMINASATA dan Perubahan Sosial di Pedesaan* (Makassar; LP2M UIN Alauddin, 2014)
- Pontoh, Coen Husain (2005) *Malapetaka Demokrasi Pasar* (Yogyakarta; Resist Book)
- Amien Tohari, Muhamad Ridha, Dkk *Sistem Agraria Perkebunan, Orang Miskin, Dan Demokrasi Lokal Di Blitar* Laporan Penelitian sitematis STPN Yogyakarta
Jurnal Satu Kata edisi Perdana tahun 2007
<http://www.lakpesdam.or.id/warta/187/perlukah-pilkada-llangsung-dihapus>
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/25/utama/1765328.htm>
<http://io.ppi-jepang.org/cetak.php?id=60>
<http://www.kapanlagi.com/h/0000054195.html>
<http://www.berdikarionline.com>